

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Mutu madrasah harus terus menerus ditingkatkan seiring dengan kemajuan teknologi yang berkembang. Terlebih bahwa Pemerintah dalam hal ini kementerian agama telah memberikan kewenangan kepada madrasah untuk mengelola sekolahnya masing-masing. Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah.

Secara umum manajemen pengembangan mutu dapat diartikan sebagai model manajemen yang memberikan otonomi yang lebih besar kepada sekolah, memberikan fleksibilitas keluwesan-keluwesannya kepada sekolah, dan mendorong partisipasi secara langsung warga madrasah (guru, siswa, kepala sekolah, karyawan dan masyarakat termasuk di dalamnya orang tua murid, tokoh masyarakat, ilmuwan, dan pengusaha) untuk meningkatkan mutu madrasah berdasar kebijakan pendidikan nasional serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan otonomi yang lebih, maka madrasah memiliki kewenangan yang lebih besar pula dalam mengelola sekolahnya, sehingga madrasah lebih mandiri. Dengan kemandiriannya, madrasah lebih berdaya dalam mengembangkan program-program yang tentu saja lebih sesuai dengan

kebutuhan dan potensi yang dimilikinya. Dengan fleksibilitas dan keluwesannya, madrasah akan lebih lincah dalam mengelola dan memanfaatkan sumberdaya madrasah secara optimal.

Demikian pula dengan partisipasi warga madrasah dan masyarakat secara langsung dalam penyelenggaraan sekolah, maka rasa memiliki ini akan menyebabkan peningkatan rasa tanggungjawab, dan peningkatan rasa tanggungjawab akan meningkatkan dedikasi warga madrasah dan masyarakat terhadap sekolah. Inilah esensi partisipasi warga madrasah dan masyarakat dalam pendidikan. Baik peningkatan otonomi sekolah, fleksibilitas pengelolaan sumberdaya madrasah maupun partisipasi warga madrasah dan masyarakat dalam penyelenggaraan madrasah tersebut kesemuanya ditujukan untuk meningkatkan mutu madrasah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.¹

Madrasah Tsanawiyah sekarang telah diberi otonomi yang luas guna mengembangkan institusinya agar lebih mandiri. Wewenang madrasah dalam kebijakan baru pemerintah itu adalah Manajemen Berbasis Madrasah (MBS) atau *School Base Manajement (SBM)*.

Pemberdayaan madrasah dengan memberikan otonomi yang lebih besar tersebut di samping menunjukkan sikap tanggap pemerintah terhadap tuntutan masyarakat, juga dapat dipakai sebagai sarana peningkatan efisiensi pendidikan (*improving school efficiency*). Argumentasinya ialah, krisis ekonomi yang melanda Indonesia berdampak luas terhadap pendidikan, terutama pada dua segi, *pertama*, mengurangi kemampuan pemerintah menyediakan dana yang cukup untuk pendidikan dan *kedua*, menurunkan kemampuan orang tua dalam pembiayaan pendidikan anaknya. Dengan melibatkan masyarakat dalam pengelolaan madrasah, maka beban pemerintah

¹*Konsep Manajemen berbasis Sekolah*, [http:// www, Dikdasmen, Depdiknasgo.id/html/PLP/MPMBS-KONSEP-htm](http://www.Dikdasmen, Depdiknasgo.id/html/PLP/MPMBS-KONSEP-htm). Diakses tanggal 23 Desember 2011

dapat dikurangi. “Di samping itu mengikutsertakan kepala madrasah dan guru dalam pengambilan keputusan-keputusan madrasah terhadap sekolahnya. Hal ini pada akhirnya mendorong mereka untuk menggunakan sumber daya yang ada secara efisien untuk mencapai hasil yang optimal”.³

Fungsi desentralisasi pendidikan yang dilimpahkan kewenangannya pada madrasah yang meliputi 7 aspek, yaitu, manajemen kurikulum dan program pengajaran, manajemen tenaga pendidikan, manajemen kesiswaan. Manajemen keuangan dan manajemen pembiayaan, manajemen sarana dan prasarana pendidikan, manajemen hubungan madrasah dengan masyarakat, dan manajemen layanan khusus⁴.

Dengan pelimpahan wewenang dari pusat ke madrasah lokal ini maka timbul pertanyaan bagaimana upaya pengelola madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan di madrasah masing-masing.

Untuk menjawab pertanyaan di atas peneliti sengaja mengadakan penelitian di Madrasah Tsanawiyah Negeri Mojoroto Kota Kediri. MTsN Mojoroto Kota Kediri cukup survive dalam pengelolaannya. Paling tidak sampai sekarang ia tergolong populer di masyarakat, dan *output*-nya juga termasuk diakui keunggulannya.

Dari tingkat keberhasilan itu menarik peneliti untuk mengadakan penelitian di MTsN Mojoroto Kota Kediri tersebut dengan harapan sistem pendidikan yang diterapkan untuk dapat diterapkan di madrasah – madrasah lain.

³ Faisal Jalal Cs, *Reformasi Pendidikan dalam Konteks Otonomi Daerah*, (Yogyakarta: Adi cita, 2001), 152

⁴ Imron Arifin, *Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah, dalam* (Jurnal pemikiran dan Kebudayaan, Empirisme, STAIN Kediri, 2003), 30

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dalam penelitian ini meliputi:

1. Bagaimana peran komite madrasah dalam manajemen berbasis sekolah untuk meningkatkan mutu madrasah di MTsN Mojoroto Kota Kediri ?
2. Bagaimana pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan dalam meningkatkan mutu madrasah di MTsN Mojoroto Kota Kediri?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini meliputi:

1. Untuk mengetahui peran komite madrasah dalam manajemen berbasis sekolah untuk meningkatkan mutu madrasah di MTsN Mojoroto Kota Kediri.
2. Untuk mengetahui pemberdayaan pendidik dan tenaga kependidikan dalam meningkatkan mutu madrasah di MTsN Mojoroto Kota Kediri.

C. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian dari permasalahan yang telah dikemukakan di atas adalah sebagai berikut ini:

1. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan dibidang pendidikan khususnya tentang manajemen dalam mengelola madrasah.
2. Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk pengembangan dan meningkatkan mutu madrasah.

3. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi alternatif pengembangan madrasah dan sebagai referensi dalam menata manajemen madrasah.